

Peranan Pendidikan dalam Menghadapi Berbagai Isu Strategis Pembangunan di Indonesia

Oleh : Helmi Hasan

ABSTRACT

The strategic issues faced by Indonesian people include national disintegration and democratization, free-market, democratic economy, and the enchancing of educational quality. This paper will analyze the role of education in facing those issues. The analysis begins from the phenomena existed all this time; and try to anticipate the spread of the national problem. It seemed that all this time, the solving of this problem tended to give less attention to educational aspect, while it was very important and essential to solve this problem. Therefore, we should make any revolution in educational world, have high commitment to and be consistent with the rule as stated in our constitution, Undang-undang Dasar 1945, that still far from the good implementation.

Kata kunci: Mutu Pendidikan, Isu Strategis, Disintegrasi, Demokratisasi, Ekonomi Kerakyatan

I. PENDAHULUAN

Sudah sepuluh tahun era reformasi berjalan di Indonesia, namun tekad untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara yang hancur pada era sebelumnya masih belum memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Laju kemiskinan tetap meningkat, gejala disintegrasi bangsa masih ditemui, tingkat pencurian dan korupsi masih tergolong tinggi, pelanggaran dan penegakan hukum masih dipermasalahkan orang banyak.

Berbagai upaya untuk itu telah banyak dilakukan, diantaranya melakukan amandemen terhadap UUD 1945 yang merupakan aturan dasar dalam menyusun ketatanegaraan Republik Indonesia, antara lain menghapus Ketetapan MPR No. II/MPR/ 1978 tentang P4 yang dinilai sebagai upaya melestarikan kekuasaan Orde Baru, memberikan otonomi yang luas kepada daerah dengan mengeluarkan UU.No.22 tahun 1999

yang diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004, memperkuat perekonomian rakyat dengan ekonomi kerakyatan, menentang dan mengikis KKN karena negara Indonesia yang termasuk negara paling korup di dunia.

Upaya memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara itu tidak akan berhasil bila tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, dan bukan hanya oleh pemerintah. Disamping itu perubahan juga tidak akan terjadi secara cepat seperti membalikkan telapak tangan karena permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia sudah melingkupi aspek yang luas, merusak banyak sendi kehidupan yang masing-masing aspek atau sendi itu saling berkaitan. Pendekatan keamanan melalui militer dan aparat kepolisian telah juga dilakukan.

Saat ini banyak isu-isu yang berkembang, diantaranya isu strategis yaitu isu yang sangat menentukan dan mempengaruhi pencapaian tujuan nasional yang dicita-citakan. Isu-isu tersebut perlu disikapi dengan serius oleh berbagai unsur masyarakat sesuai dengan fungsi dan peran yang dimilikinya. Dalam makalah ini akan dikemukakan beberapa isu tersebut dan peranan pendidikan dalam menyikapi isu tersebut.

Diharapkan apa yang diungkapkan dalam tulisan ini menjadi bahan diskusi yang bermanfaat dalam membangun pendidikan di masa datang.

II. ISU STRATEGIS DAN PERAN PENDIDIKAN

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia banyak isu yang tumbuh dan berkembang dan ia muncul hampir di setiap bidang kehidupan. Isu strategis yang hendak diungkapkan di sini adalah isu-isu yang menyangkut peran generasi muda dalam kehidupan sosial budaya dan dunia pendidikan yaitu: disintegrasi bangsa dan demokratisasi, ekonomi kerakyatan dan pasar bebas, serta peningkatan mutu pendidikan.

Isu Disintegrasi Bangsa dan Demokratisasi

Di bidang politik isu yang menonjol saat ini adalah masalah disintegrasi bangsa. Suatu kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan berbangsa adalah terjadinya berbagai konflik di berbagai daerah di wilayah Indonesia. Sebagai contoh dapat dikemukakan masalah di Aceh, Poso, Ambon, konflik antar suku di Kalimantan, konflik di Nusa Tenggara Barat, di Papua dan berbagai konflik antar kelompok lainnya. Disamping itu juga terlihat

berbagai peristiwa yang mengganggu keutuhan bangsa seperti pemboman tempat-tempat tertentu, perkelahian antar kelompok, antar daerah dan sebagainya.

Konflik yang terjadi telah membawa korban yang begitu banyak tidak saja materil tetapi juga ribuan jiwa. Banyak mereka yang diungsikan ke tempat-tempat yang aman. Disamping itu juga timbul rasa dendam dan keinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dampak lebih jauh adalah berkurangnya kepercayaan negara lain kepada Indonesia yang juga akan berpengaruh kepada investasi atau pembangunan bangsa dan negara.

Latar belakang munculnya konflik itu dipicu oleh melemahnya identitas bersama dan menonjolnya perbedaan kepentingan, agama, dan budaya yang akar permasalahannya adalah belum dihayati dan diamalkan ideologi negara dan bangsa secara baik dan utuh. Langkah-langkah penyelesaian konflik telah banyak dilakukan. Khusus mengenai konflik Aceh dan Maluku, telah diberikan otonomi khusus. Musyawarah/perundingan untuk merealisasikan itu telah dilakukan, namun di lapangan masih mengalami gejolak yang saat-saat tertentu memperlihatkan sosoknya. Penyelesaian yang menonjol yang terlihat dengan kasat mata adalah

pendekatan keamanan (*security approach*).

Pendekatan keamanan yaitu tindakan kemeliteran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut bukanlah jalan yang paling ampuh karena berdampak kepada kehancuran akan sumber-sumber kehidupan. Upaya yang lebih menyentuh sebetulnya adalah di bidang pendidikan yaitu memperkuat identitas bersama. Upaya itu mempunyai dampak positif yaitu tertanamnya nilai-nilai nasionalisme, kekeluargaan serta sikap saling menghormati. Tenaga kependidikan serta konselor harus diperbanyak, beasiswa anak-anak Aceh untuk belajar di luar Aceh yang terintegrasi dengan anak didik lainnya harus diperbesar. Sehingga perubahan sikap generasi baru akan terbentuk. Selagi pendekatan kemiliteran masih dipergunakan kebencian dan dendam akan tetap terbentuk.

Munculnya *identitas bersama* ditentukan oleh beberapa hal diantaranya jenis identitas, lingkungan masyarakatnya dan waktu kapan identitas itu lahir. Untuk itu guna mengetahui munculnya *identitas bersama* tersebut terlebih dahulu harus diketahui jenisnya. Menurut Charles F. Andrain¹ masalah pencip-

¹Andrain, Charles F. 1992. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. Hal: 76-76.

taan suatu identitas bersama berkisar pada perkembangan keyakinan dan nilai-nilai yang dituntut bersama yang dapat melahirkan rasa solidaritas bersama. Dari perasaan sosial tersebut timbul pemahaman bahwa mereka saling mengakui perbedaan yang satu dengan yang lainnya serta perasaan harga diri bersama, selanjutnya muncul pengakuan bersama terhadap nilai, norma-norma, dan simbol-simbol ekspresif. Perasaan identitas bersama dalam kehidupan bersama muncul dari empat tipe nilai yaitu: nilai primordial, sakral, personal dan sipil².

Identitas bersama bagi bangsa dan negara Indonesia berakar dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri yang meliputi empat nilai seperti yang dikemukakan Andrain tersebut. Ia digali dan dirumuskan sesuai dengan kebutuhan untuk mengikat dan dipedomani dalam kehidupan bersama untuk masa-masa selanjutnya. Pemikiran Andrain ini sangat sesuai dengan timbulnya identitas bersama sebagai suatu bangsa di Indonesia, seperti lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, lagu Indonesia Raya, istilah *Indonesia* untuk

menyebutkan bangsa dan tanah air, ideologi Pancasila, UUD 1945, lambang negara Garuda Pancasila, ungkapan senasib sepenanggungan, dan sebagainya.

Persamaan senasib dan sepenanggungan yang mendasari perjuangan bangsa Indonesia selama ini kini telah berubah. Lihatlah generasi muda saat ini, tidak lagi merasakan perasaan senasib sepenanggungan itu, Mereka lebih realistis melihat ada orang kaya yang penuh dengan kemewahan. Sebagian lagi dilihat dan dirasakannya kemiskinan dan penderitaan. Sebagian orang tidak bangga lagi memiliki Pancasila sebagai ideologi. Mereka lebih senang hidup dalam suasana ideologi negara lain dan menggunakan produksi asing dan bukan produksi negaranya sendiri. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara terlihat sebagai ungkapan bibir saja dan jauh dari realita. Begitu juga UUD 1945 yang selama ini dijadikan tameng untuk melestarikan kekuasaan. Inilah realita kehidupan kita. Apakah tidak wajar munculnya konflik yang menjurus disintegrasi bangsa?

Sekarang kita harus berpaling ke dunia pendidikan untuk memperbaiki bangsa dan negara ini dengan menanamkan dan menumbuhkan identitas bersama. Identitas bersama yang sudah ada seperti lagu

² *Ibid*, hal: 82.

Indonesia Raya, Ideologi Pancasila, UUD 1945 harus dijelmakan dalam kehidupan. Disamping itu dicari identitas bersama lainnya dan ditumbuhkan mulai dari lingkungan sendiri. Semua ini menjadi peran dari pendidik dan generasi muda karena pendidikan dan jiwa muda lah yang merupakan senjata ampuh dalam mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Sampai saat ini masih belum banyak orang menyadarinya, termasuk pemerintah yang terbukti dari kecilnya anggaran pendidikan yang dicantumkan dalam APBN ataupun APBD.

Isu strategis lain di bidang politik adalah demokratisasi. Kehidupan bangsa dan negara pada era Orde Baru dinilai tidak demokratis, karena kekuasaan pada hakekatnya bertumpu pada satu tangan. Kehidupan politik dimonopoli oleh satu partai atau golongan. Kondisi ini di era reformasi diperbaiki dan ditata kembali dengan harapan terwujudnya negara yang demokratis. Upaya untuk itu semakin terlihat, ciri-ciri negara demokrasi makin tampak dalam realisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini diantaranya dapat ditunjukkan antara lain adanya kebebasan mengemukakan pendapat, hak berunjuk rasa, kebebasan berorganisasi dan mendirikan partai politik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, peningkatan peran wanita yang selama ini dinilai tertinggal, dan

sebagainya. Dibalik itu kita juga melihat berbagai penyalahgunaan diantaranya kebebasan mengemukakan pendapat yang seenaknya saja, mendirikan organisasi dan partai politik yang kadang kala membinggunkan rakyat, mengkhambinghitamkan hak asasi dan isu gender, dan sebagainya.

Hal yang terakhir ini telah membawa pula bangsa dan negara ini kearah ketidak stabilan. Terhadap kondisi itu apa yang bisa kita perbuat? Jawabnya adalah peningkatan kualitas pendidikan. Demokrasi akan berjalan dengan baik bila masyarakatnya terdidik dan memiliki ilmu pengetahuan. Mereka harus sadar akan hak dan kewajibannya. Disamping adanya kebebasan diperlukan toleransi. Toleransi menjadi paling penting saat seseorang tidak setuju atau merasa tidak empati dengan yang lainnya³. Banyak ahli ilmu politik⁴, seperti Prof. Miriam Budiardjo, yang memper-syaratkan adanya Pendidikan Kewarganegaraan sebagai syarat terwujudnya demokrasi.

Langkah maju untuk mewujudkan demokrasi makin terlihat dengan telah diamandemennya UUD

³ Sutton, Margaret. 2005. "Toleransi: Nilai Dasar dalam Pelaksanaan Demokrasi", *Makalah*, Jurusan ISP FIS UNP. hal: 3.

⁴Miriam Budiardjo. 1986. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Bandung: Renika.

1945 oleh MPR. Hasil amendemen pada dasarnya memperkuat kedudukan dan fungsi lembaga perwakilan rakyat (MPR, DPR dan DPRD). Kedudukan dan fungsi yang kuat secara yuridis saja belum akan banyak berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara bila tidak diisi oleh manusia Indonesia yang berkualitas. Proses pengisian keanggotaan lembaga perwakilan rakyat tersebut dilakukan melalui pemilihan umum. Dengan sendirinya pemilihan umum merupakan isu strategis dalam kehidupan bernegara yang perlu ditanggapi secara serius oleh bangsa Indonesia. Pengabaian faktor pendidikan akan berdampak negatif terhadap pembangunan bangsa dan negara. Lihat peristiwa sidang DPR yang membicarakan kenaikan BBM baru-baru ini dimana saling memukul terjadi, sangat memalukan. Untuk itu upaya pendidikan harus mampu menjangkau hal-hal yang semacam itu.

Pada tahun 2004 telah dilaksanakan pemilihan umum yang oleh banyak orang disebut dengan pesta demokrasi. Dengan pemilihan umum tersusunlah aparat pemerintahan yang akan memberikan warna kepada kehidupan bangsa untuk masa datang khususnya lima tahun kedepan. Pemilihan Umum 2004 sedikit berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya. Melalui pemilu 2004 Presiden dipilih langsung oleh

rakyat, begitu juga pemilihan anggota lembaga perwakilan rakyat tidak berdasarkan tanda gambar partai semata tetapi juga kepada tokoh yang dicalonkannya. Pada tahun 2005 ada lagi pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah sejauh mana rakyat mampu memilih orang yang komitmen dengan pembangunan bangsa?

Masyarakat Indonesia masih belum banyak menyadari akan arti dari pemilihan umum, belum begitu menyadari akan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya. Untuk itu peran pendidikan memegang peranan penting apalagi generasi muda sebagai sasaran pendidikan merupakan pewaris demokrasi.

Pengalaman di banyak negara, proses demokratisasi berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan memerlukan perangkat pendidikan. Apalagi dalam masyarakat yang multikultural seperti Indonesia. Pendidikan multikultural dirasakan semakin diperlukan. Pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus dan toleransi terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat pluralistik⁵.

⁵Syafnil Effendi. 2005. "Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia: Peluang dan

Ekonomi Kerakyatan dan Pasar Bebas

Isu strategis di bidang ekonomi selain pasar bebas adalah peningkatan taraf hidup masyarakat dengan ekonomi kerakyatan yang bertujuan memperkuat kondisi ekonomi rakyat banyak yang dilanda kemiskinan. Saat ini kita sudah era memasuki pasar bebas, dan suasana negatifnya makin hari makin dirasakan. Apalagi dalam dunia internasional. Persaingan pasar terhadap barang dan jasa semakin terlihat, dan yang menang tetap pelaku ekonomi yang kuat. Sementara sebagian besar masyarakat Indonesia tergolong kepada pelaku ekonomi yang berkemampuan lemah. Akibatnya kemiskinan rakyat banyak akan tetap tidak teratasi.

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang saling berhubungan dengan faktor-faktor lainnya dan sangat sulit untuk mengatasinya. Kajian tentang kemiskinan dan cara untuk mengenyahkannya tidak dapat hanya dipolakan pada pengalaman negara kaya saja⁶. Usaha untuk mengatasi kemiskinan disamping mempedomani dan menggunakan teori-teori pembangunan ekonomi

Tantangan”, *Makalah*, Jurusan ISP FIS UNP. hal: 5.

⁶M.L. Jhingan. 1999. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal: 4.

yang berkembang di negara barat juga harus memperhatikan faktor-faktor lainya seperti pendidikan, kondisi sosial, ideologi, keamanan, penduduk, geografis dan sebagainya.

Masyarakat miskin biasanya ditandai oleh rendahnya tingkatan pendidikan dan keterampilan, jumlah penduduk yang besar, kurangnya aset produksi dengan kekuatan sendiri, serta penghasilan dan daya beli rendah. Selain dari itu sebagaimana diungkapkan oleh Dr.Eugene Staley⁷ bahwa metode produksi dan organisasi sosial yang usang.

Melihat tanda-tanda masyarakat miskin tersebut, Indonesia dapat digolongkan kepada negara miskin, karena sebagian besar tanda-tanda itu dimilikinya bahkan ada yang tergolong kepada kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah kondisi kemiskinan suatu masyarakat yang disebabkan oleh kemiskinan sebelumnya. Kemiskinan sebelumnya itu juga disebabkan oleh kemiskinan sebelumnya lagi. Jadi di sini adanya konsep lingkaran kemiskinan (*Vicious Circle*). Pada masyarakat yang mengalami kemiskinan kultural diperlukan inovasi karena inovasi memberikan perubahan-perubahan dalam masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan. Menurut Schumpeter pengenalan produk baru

⁷ Dalam M.L. Jhingan. 1999. *Ibid*, hal 11.

dan perbaikan terus menerus pada produk inilah yang membawa kepada pembangunan⁸. Disamping itu di Indonesia banyak terdapat pengangguran tersembunyi yang disebabkan karena sulitnya lapangan kerja.

Masalah kemiskinan dalam masyarakat tidak bisa dipecahkan dengan pendekatan ekonomi saja tetapi juga dengan pendekatan lainnya. Untuk memecahkan masalah kemiskinan, pendekatan pendidikan harus disejajarkan dengan pendekatan ekonomi. Kesalahan selama ini terlalu memprioritaskan pendekatan ekonomi sehingga berbagai ketimpangan terjadi. Dana 20 % dari APBN dan 20 % dari APBD seperti yang di gariskan oleh UUD 1945 harus direalisasikan untuk pendidikan secara konsisten dan tidak bisa ditawar lagi walaupun dengan berbagai alasan.

Pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebab pendidikanlah yang mengantarkan masyarakat dapat beradaptasi dengan nilai baru atau berinovasi. Bertolak dari kenyataan yang terdapat dalam masyarakat seperti yang diungkapkan di atas dan karena masih banyaknya pengangguran tersembunyi, fatalisme, rasa cepat puas dan

berpandangan sempit, maka pendekatan pendidikan merupakan jalan yang tepat untuk mengatasinya. Selain dari itu dalam menghadapi pasar bebas pendidikan dan keterampilan yang dimiliki akan menjadi faktor penentu dalam persaingan

Peningkatan Mutu Pendidikan.

Pendidikan tidak saja sebagai jalan pemecahan masalah tetapi juga merupakan isu strategis yang perlu dibicarakan lebih serius. Di bidang pendidikan isu strategis saat ini adalah peningkatan mutu. Isu ini bertolak dari kenyataan-kenyataan yang ditemui selama ini baik yang kita rasakan sendiri ataupun berdasarkan penilaian pihak lain.

Laporan Komisi Nasional Pendidikan Indonesia tahun 2001 mengungkapkan pada bagian pengantarnya bahwa hasil penelitian dari berbagai lembaga resmi seperti *Human Development Report UNDP*, pada tahun 1997 menemukan bahwa indeks pembangunan manusia Indonesia berada pada tingkat 109. Walaupun tahun 2001 terdapat peningkatan sehingga menjadi urutan ke 102, namun tetap berada dibawah negara Vietnam.

Pada pendidikan dasar laporan Bank Dunia menyatakan bahwa hasil tes membaca murid SD kelas IV berada pada peringkat

⁸ *Ibid*, hal: 126.

terendah di Asia Timur. Kemampuan membaca itu terlihat dari kemampuan memahami materi bacaan. Persentase yang diperoleh hanya 36 persen. Selain dari itu mengalami kesulitan dalam menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Dalam bidang matematik dan IPA hasil studi *The Third International Mathematics and Science Study* pada tahun 1999 di antara 38 negara, prestasi belajar siswa SLTP kelas 2 Indonesia berada pada peringkat 32 untuk IPA dan 34 untuk matematika.

Kondisi pendidikan dasar seperti yang diungkapkan di atas mempunyai pengaruh besar terhadap pembelajaran pada jenjang pendidikan lebih tinggi, karena pendidikan dasar adalah basis dari setiap jenjang pendidikan. Pada pendidikan dasar selain dari pemberian kemampuan dasar juga menanamkan kebiasaan-kebiasaan belajar yang baik, dan nilai-nilai yang diperlukan dalam menghadapi dunia kehidupan. Keberhasilan dalam pendidikan dasar akan mendukung pelaksanaan pembelajaran pada jenjang berikutnya. Oleh karena itu pendidikan dasar perlu diperkuat dengan jalan pembenahan berbagai segi yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran.

Peningkatan daya saing bangsa sebagai salah satu pilar pendidikan selalu memperlihatkan

kecenderungan menurun. Menurut catatan *World Economic Forum (WEF)* tahun 2004 posisi daya saing ekonomi Indonesia menempati urutan 64 dari 104 negara yang diteliti. Kondisi itu berada dibawah Malaysia (urutan 31) dan Thailand (urutan 34). Posisi Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 2000 secara berturut-turut sbb: urutan 43 (th. 2000), 46 (th. 2001), 47 (th. 2002), 57 (th.2003).

1. Mutu Pendidikan dan Faktor yang Mempengaruhinya

Membicarakan mutu sebetulnya memberikan penilaian dari suatu produk, apakah produk itu telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan atau belum. Sesuatu dikatakan telah bermutu bila produk itu telah memenuhi standar atau kreteria yang telah ditetapkan. Dalam dunia pendidikan standar itu dapat dirumuskan melalui hasil belajar dari mata pelajaran tertentu di sekolah secara kuantitatif yaitu berupa penilaian dalam angka-angka, dan berdasarkan pengamatan terhadap aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan sikap dan prilaku. Penilaian terhadap mutu dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dilihat dari sudut pelaksanaan pembelajaran, dikatakan bermutu bila produk itu sesuai dengan tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan dilihat dari orang yang memberikan penilaian, bermutu tidaknya tergantung kepada pemanfaatan produk itu dalam lingkungan kehidupan selanjutnya. Seperti tingkat sekolah yang lebih tinggi atau lapangan kerja. Dalam konteks sistem pendidikan nasional, mutu pendidikan tercermin dari sejauh mana tujuan pendidikan nasional itu dapat dicapai.

Pencapaian tujuan pendidikan nasional ditentukan pula oleh pencapaian tujuan institusional, tujuan kurikuler dan tujuan pembelajaran. Keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran secara maksimal di sekolah akan menggambarkan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu mutu pendidikan lebih banyak ditentukan oleh pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah mempedomani kurikulum yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional melalui berbagai lembaga yang diberi kewenangan untuk itu. Komisi kurikulum dan unsur pendidikan lainnya yang mengembangkan kurikulum mesti jeli melihat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kurikulum mampu mengantarkan produk kepada harapan pemakai.

Faktor lain yang mempengaruhi mutu adalah relevansi kurikulum dengan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang dan dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan. Penerapannya memerlukan sumber-daya manusia yang dihasilkan dari berbagai lembaga pendidikan. Untuk itulah kurikulum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan harus relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Persaingan sumber tenaga manusia akan terjadi dimana-mana. Saat ini menurut Prof. Syamsul Amar (rapat senat FIS 24-2-2005) dari laporan UNDP kemampuan berkompetisi Indonesia dalam pasar kerja hanya 8% dan kelemahannya lebih banyak terletak pada kemampuan berkomunikasi. Ini merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia. Generasi muda khususnya mahasiswa harus mampu melihat kedepan terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut.

Arus globalisasi tidak bisa dihindarkan, pasar bebas tidak lama lagi akan muncul dihadapan kita. Persaingan tenaga kerja dan pasar akan selalu menjadi tantangan. Mampukah menghadapinya?. Hal ini tergantung kepada kesiapan kita. Anak-anak usia sekolah termasuk mahasiswa perlu dipersiapkan. Bukan sekedar wajib belajar dengan bersekolah, tetapi yang lebih penting adalah pembelajaran itu harus

bermutu. Lulusan atau produk harus mampu bersaing di pasar dan berhasil dalam bersaing.

Sejalan dengan arus globalisasi itu dampak negatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang juga mempengaruhi mutu pendidikan, karena anak-anak usia sekolah dan mahasiswa terlihat sibuk memanfaatkannya. Waktu-waktu belajar mereka sering terpakai bahkan terbuang tanpa banyak arti. Pada hal kerja keras dan hemat adalah kunci keberhasilan seperti halnya orang-orang Cina⁹. Siaran televisi dan VCD yang menarik ada sepanjang waktu, playstation terdapat diberbagai tempat. Nilai-nilai yang bersumber dari budaya asing menyusup bersama siaran televisi dan media lainnya. Sementara nilai-nilai yang berakar dari budaya Indonesia dan agama makin hari makin menurun. Kondisi ini dapat berakibat munculnya berbagai konflik dalam masyarakat yang ujungnya mutu pendidikan makin menurun.

Prasarana dan sarana yang dimiliki sekolah dan pemanfaatannya ikut berperan dalam menentukan mutu pendidikan. Khusus buku-buku pelajaran dan sumber belajar lainnya memberikan

kontribusi yang cukup menentukan terhadap keberhasilan belajar. Selama ini mungkin kurang menjadi perhatian karena dalam pelaksanaan pembelajaran lebih banyak bersifat satu arah. Guru atau dosen dengan kemampuannya mencurahkan materi pelajaran kepada siswa/mahasiswa dan mereka mencatat bahkan juga dicatatkan dipapan tulis atau didiktekan. Inilah sumber belajar bagi siswa/ mahasiswa. Setiap akan menghadapi ujian, cacatan inilah yang dipelajari kembali sedangkan buku-buku pelajaran terabaikan. Bagi sekolah atau perguruan tinggi yang sarananya sangat terbatas mungkin hal ini merupakan kewajaran, tetapi dalam konteks lebih luas hal ini jelas akan berakibat tertinggal dari sekolah atau perguruan tinggi yang memanfaatkan sarana tersebut.

Pemanfaatan sarana pembelajaran sangat ditentukan oleh strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru atau dosen. Kebiasaan pembelajaran yang tidak sesuai dengan prinsip CBSA seperti yang umum terjadi saat ini jelas akan mematikan kreativitas pada hal kreativitas merupakan modal dalam meningkatkan mutu.

Faktor yang sangat menentukan terhadap mutu pendidikan adalah proses pembelajaran dan evaluasi yang dilakukan di sekolah. Walaupun Depdiknas telah mengeluarkan kuri-

⁹Naisbitt, John. 1996. *Megatrends Asia Delapan Megatrend Asia yang Mengubah Dunia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hal: 16.

kulum yang berbasis kompetensi (KBK) dan petunjuk teknisnya yang mengarahkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi, namun dalam realisasinya masih jauh dari harapan. Masih banyak guru yang belum mampu melaksanakannya (Workshop tentang Pendidikan Kewarganegaraan, 15-3-05).

Dilihat dari sudut keaktifan dalam pembelajaran selama ini lebih terpusat kepada keaktifan guru/ dosen bukan siswa/ mahasiswa. Pada hal dalam kurikulum dan praktek pendidikan pada negara-negara maju lebih terpusat kepada siswa/ mahasiswa. Bila pembelajaran terpusat kepada keaktifan guru/dosen tentunya keberhasilan pembelajaran sangat ditentukan oleh faktor guru/ dosen tersebut. Sementara kemampuan guru/ dosen pada umumnya sangat terbatas, kehidupan ekonominya relatif rendah, organisasi profesinya yang lemah, jumlahnya belum sesuai dengan harapan, latar belakang pendidikan pada umumnya masih banyak dibawah standar. Laporan Komisi Pendidikan Nasional tahun 2001 menyatakan faktor rendahnya mutu pendidikan adalah karena kondisi guru yang masih mismacth dalam dua hal yaitu penempatan guru yang tidak merata, dan guru yang tidak layak dan atau tidak sesuai mengajar dengan penempatannya. SEAMEO (2001) mengungkapkan bahwa tahun 2001

terdapat 62 % guru SD yang tidak layak mengajar sedangkan SLTP 26%.

Evaluasi keberhasilan murid/ siswa pada umumnya menggunakan acuan norma dengan standar relatif sehingga mutu produk sukar dibandingkan dan semu, walaupun sudah diatasi dengan EBTANAS/ UAN, tetapi produk masih dipertanyakan oleh pemakai. Selama ini kita melihat hampir semua anak naik kelas atau lulus EBTA. Kalau ada sekolah yang muridnya banyak tinggal kelas atau tidak lulus EBTA sekolah tersebut di nilai tidak baik. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah hal ini betul-betul memperlihatkan keberhasilan sekolah dengan mutu yang sesuai harapan? Ataupun sebaliknya. Sebab dengan sistem penilaian selama ini guru dapat berlindung dibalik sistem tersebut. Kelemahan guru tidak terlihat oleh orang banyak dan akhirnya guru tidak termotivasi memperbaiki kelemahan-kelemahan pelaksanaan pembelajarannya, sehingga pelaksanaan pembelajaran seperti itu juga tidak mengalami perbaikan.

2. Upaya Peningkatan Mutu.

Upaya peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan dengan perubahan cepat (revolusi) tidak saja karena

tertinggal dari negara-negara lain seperti yang disebutkan di atas, tetapi yang lebih penting adalah dalam rangka menghadapi tantangan kehidupan yang semakin hari semakin berat. Akan lebih berat lagi dengan akan bergulirnya pasar bebas. Pendidikan adalah senjata ampuh untuk itu.

Bertolak dari kondisi negara dan masyarakat Indonesia sekarang ini dan faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan seperti tersebut diatas beberapa hal yang perlu ditingkatkan adalah:

- 1) Perbaikan proses pembelajaran
- 2) Kemampuan dan komitmen guru/dosen.
- 3) Melengkapi prasarana dan sarana belajar di sekolah
- 4) Kerjasama dengan berbagai pihak
- 5) Penciptaan suasana yang kondusif untuk pendidikan.
- 6) Memupuk Bakat dan Kreativitas

Penentuan pilihan dari sekian banyak alternatif yang dapat dilakukan memerlukan suatu diagnosis yang tepat. Dengan diagnosis lah dapat mengetahui permasalahan secara jelas dan terhadap masalah yang jelas itu akan mudah mencari pemecahannya. Diagnosis dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi mutu seperti yang diungkapkan diatas. Hasil diagnosis terhadap lembaga pendidikan tertentu akan melahirkan profil yang jelas dari lembaga

pendidikan tersebut. Dari sanalah kita berangkat melakukan aksi untuk peningkatan mutu pendidikan.

III. PENUTUP

Isu strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hampir melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia. Isu tersebut harus menjadi perhatian dan disikapi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, karena menyangkut pencapaian tujuan bangsa dan negara. Diantara isu strategis itu ialah: disintegrasi bangsa dan demokratisasi, pasar bebas dan ekonomi kerakyatan, serta peningkatan mutu pendidikan.

Dalam menyikapi isu tersebut faktor pendidikan memegang posisi sentral dan sangat menentukan. Tanpa mengabaikan peran sektor lainnya, dalam bidang pendidikan perlu dilakukan perubahan secara cepat (revolusi) apalagi bila mengejar kemajuan-kemajuan yang telah dicapai negara lain dan dalam menghadapi pasar bebas. Perlu adanya komitmen yang tinggi serta konsekwen dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 yang saat sekarang kenyataannya jauh dari harapan.

Disamping itu sebagaimana dikemukakan oleh Imam Barnadib¹⁰,

¹⁰ Imam Barnadib. 1994. *Filsafat Pendidikan (Pengantar Mengenal Sistem dan Metode)*. Yogyakarta: Andi Offset.

pendidikan juga berkedudukan dialektik terhadap masyarakat, kemudian pengaruh pada masyarakat itu mempengaruhi lagi pada pendidikan. Mudah-mudahan upaya

yang dilakukan dalam dunia pendidikan ini akan mengangkat bangsa dan negara ini kepada yang lebih baik dari apa yang dirasakan saat ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Andrain, Charles F. 1992. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Imam Barnadib. 1994. *Filsafat Pendidikan (Pengantar Mengenal Sistem dan Metode)*. Yogyakarta: Andi Offset,.
- M.L. Jhingan. 1999. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miriam Budiardjo. 1986. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Bandung: Renika.
- Naisbitt, John. 1996. *Megatrends Asia Delapan Megatrend Asia yang Mengubah Dunia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sutton, Margaret. 2005. "Toleransi: Nilai Dasar dalam Pelaksanaan Demokrasi", *Makalah*, Jurusan ISP FIS UNP.
- Syafnil Effendi. 2005. "Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia: Peluang dan Tantangan", *Makalah*, Jurusan ISP FIS UNP.